

MODERNISASI BUDAYA POLITIK MANGKUNEGARAN¹

Wasino

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Budaya politik tercermin dari cara elite dalam mengambil suatu kebijakan dan mengimplimentasikannya. Mangkunegaran sebagai sebuah kepangeranan hasil dari perpecahan kerajaan Mataram tidak mengikuti budaya politik mataram yang feodal tradisional. Mereka tidak lagi melihat raja sebagai wakil dari Tuhan tetapi mereka berkuasa karena andil dari rakyat. Rakyat yang dimaksud adalah mereka yang berjuang mendukung sang pangeran melawan penjajah Belanda dan Penguasa Mataram yang dianggap lalim. Terdapat tiga prinsip budaya politik di Mangkunegaran yakni mulat sarira hangrasa wani, rumangsa melu handarbeni, melu hangrungkebi. Ketiga hal ini yang kemudian membuat Mangkunegaran terkesan memodernisasi birokrasi pemerintahan dan secara tidak langsung merubah etiket yang ada.

Kata-kata kunci. Budaya politik, elite, kebijakan, Mangkunegaran

Abstract. The way of elites in issuing and executing a policy reflects the political culture of a state. Mangkunegaran as a principality, from the court of Mataram disintegration, does not imitate the political culture of Mataram which has the traditional-feodal system. They do not look a king as a representation of God but they have a power from people. The people is who is pursuing and supporting the prince to face the Dutch and the corrupt king of Mataram. There are three principles of Mataram political culture. Those are (1) mulat sarira hangrasa wani, (2) rumangsa melu handarbeni, (3) melu hangrungkebi. This shapes Mangkunegaran seemed modernizing governmental bureaucracy and changing the etiquette indirectly.

Keywords. Political culture, elite, policy, Mangkunegaran

Kajian budaya politik merupakan salah satu aspek dari kajian ilmu sosial. Budaya politik mengacu pada dasar-dasar historis yang meluber dalam kepercayaan, perasaan, dan nilai-nilai dari sebuah sistem politik yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara warga negara dan pemerintah. Setiap negara memiliki budaya politik yang berbeda. Ada negara yang mengembangkan budaya politik demokrasi, ada pula yang mengembangkan budaya politik monarki yang feodalisitik.

Budaya politik dari suatu pemerintahan dapat dilihat dari perilaku elite penguasa dalam suatu negara bagaimana mereka bertindak berdasarkan nilai-nilai, gagasan, atau ideologi tertentu. Cara mereka mengambil kebijakan dan implementasinya dalam sebuah pemerintahan mencerminkan budaya politik tersebut. Kebijakan elite politik yang mendasarkan pada budaya politik tertentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya (Widjaya, 1988:32).

Mangkunegaran merupakan sebuah kepangeranan (*principality*) yang berdiri pada tanggal 17 Maret tahun 1757 dalam Perjanjian Salatiga antara Sunan Pakubuwono II, Nicolash Hartingh, dan Raden Mas Said. Perjanjian tersebut merupakan titik akomodasi akibat perang saudara antar keturunan Mataram selama puluhan tahun yang melibatkan VOC sebagai pendukung Sushunan.

Sebagai pecahan dari kerajaan Mataram, Mangkunegaran seharusnya mengikuti budaya politik Mataram yang feodal tradisional. Akan tetapi dalam realitas politik kepangeranan Mangkunegaran, para elite pemangku kekuasaan di Istana ini menempuh jalan yang berbeda dengan penerus kerajaan Mataram lain, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Tulisan ini menjawab permasalahan bagaimana budaya politik dan bagaimana pengaruhnya terhadap birokrasi pemerintahan Mangkunegaran.

BUDAYA POLITIK MANGKUNEGARAN

Dalam perspektif sejarah Mangkunegaran, lahirnya praja Mangkunegaran diperoleh melalui perjuangan. Babad Panambangan, sebuah kitab sejarah penting dalam keluarga Mangkunegaran, menceritakan bahwa Raden Mas Said atau yang oleh masyarakat Wonogiri dan Karang Anyar sebagai Pangeran Sambernyawa merupakan pejuang yang pantang menyerah dalam melawan persekutuan antara VOC dengan Sunan Pakubuwana II.

Perjuangan Mas Said dilatarbelakangi oleh dendam terhadap VOC yang mengasingkan orang tuanya, Pangeran Mangkunegara ke Sailan sebagai akibat dari intrik-intrik politik dalam kerajaan Mataram. Secara tradisi, Pangeran Mangkunegara berpeluang untuk menjadi Sunan Mataram, tetapi ia tidak disukai VOC. Raden Mas Said mulai memberontak pertama kali dengan bergabung dengan pasukan Cina yang meletus di Batavia tahun 1740 dan meluas hingga pantai utara Jawa Tengah dan Surakarta (Darajadi, 2008). Pemberontakan gabungan antara pasukan Cina dengan pasukan Mas Said ini berhasil membobol benteng Kartasura pada tahun 1742. Hanya atas bantuan VOC dan pasukan Cakraningratlah, pasukan musuh ini dapat diusir dari istana Kartasura pada akhir tahun 1743.

Meskipun pasukan Cina telah berhasil diusir, perjuangan Mas Said terus berlangsung. Ia bersama Sunan Kuning atau Mas Garendi melanjutkan perlawanan gerilya. Pusat gerilya di daerah yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Wonogiri. Bekas-bekas wilayah perjuangan Mas Said atau Sambernyawa ini meninggalkan banyak cerita tutur lokal tentang kehebatan pasukan sang pangeran ini.

Sesungguhnya dalam perlawanan menghadapi VOC dan Susuhunan PB II, Raden Mas Said semula sepejuangan dengan pamannya, yakni Pangeran Mangkubumi, akan tetapi dalam perjalanan waktu Pangeran Mangkubumi justru membuat kompromi dengan VOC dan Sunan dengan melakukan Perjanjian Giyanti tahun 1755

yang tidak melibatkan Mas Said. Dalam perjanjian tersebut, Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, yakni Kasunanan dan Kasultanan. Akibat perjanjian tersebut Mas Said harus berjuang sendiri dengan menghadapi tiga kekuatan, yakni VOC, Sunan Pakubuwana II, dan Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwana I.

Untuk kepentingan strategi, Mas Said telah menyerahkan diri pada tanggal 24 Februari 1757 di Grogol, daerah sebelah selatan Kota Surakarta (Rouffaer, 1931). Pertemuan ini merupakan awal dari pertemuan selanjutnya, yakni pertemuan tanggal 17 Maret 1757 di Salatiga yang dihadiri wakil dari Sultan Jogjakarta, yakni Patih Danureja. Setelah melalui tawar-menawar selama tiga jam akhirnya dicapai kesepakatan yang isinya sebagai berikut: (1) Mas Said diangkat oleh Susuhunan menjadi Pangeran Miji (pangeran terdekat/ pangeran istimewa) dan berhak menggunakan gelar ayahnya, yakni Pangeran Mangkunagara, (2) Sebagai konsekuensi dari jabatannya itu ia mendapat tanah *apanage* yang luasnya 4.000 karya dengan status *precario* (Ricklefs; Rouffaer, 1931 dan Serat Bababd Penembangan), yang meliputi daerah Keduang, Laroh, Matesih, dan Gunung Kidul, (3) ia harus tinggal di Surakarta, dan pada hari *pisowan*, yakni Senin dan Kamis ia harus hadir dan menerima perintah Sunan. Persetujuan Salatiga ini dibuat di Salatiga dengan diberi materai Sunan, Mangkunagara, dan dilakukan atas permintaan baik dari pihak Sunan maupun Mangkunagara, serta Kompeni (Houben, 2002; Wasino, 2014).

Setelah “negara” Mangkunegaran terbentuk Raden Mas Said membangun budaya politik yang unik. Budaya politik tidak semata-mata dibangun semata-mata berdasarkan budaya politik Mataram yang monarkhis-feodalistik, tetapi dibangun berdasarkan pengalaman sejarah perjuangan. Sejarah perang gerilya yang dilancarkan Mas Said selama tiga windu dijadikan refleksi untuk membangun budaya politik bagi negara baru yang dibentuknya.

Jika dalam budaya politik Jawa Mataram, negara diartikan sebagai raja, maka dalam budaya politik Mangkunegaran, negara dipisahkan antara entitas negara dengan entitas penguasa. Dalam budaya Jawa Mataram, raja adalah Kalifatullah yang bisa disejajarkan dengan wakil Tuhan atau dewa pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Sebagai wakil Tuhan, maka sang penguasa memiliki jarak sosial yang lebar dengan rakyat. Sebutan “*kawula gusti*” menggambarkan hubungan pertuanan antara “tuan dan hamba” yang memerlukan pengabdian penuh dari hamba kepada tuannya. Sementara tuan memiliki otoritas yang luas tak terbatas terhadap hambanya. Dalam budaya politik Mangkunegara, penguasa atau raja adalah ada karena rakyat. Rakyat dalam hal ini adalah para pengikut Pangeran Sambernyawa yang berjuang mendukung sang pangeran melawan penjajah Belanda dan Penguasa Mataram yang dianggap lalim. Ada 18 pengikut setia dari Mas Said yang setelah berdirinya praja Mangkunegaran mereka mendapat posisi-posisi penting dan kesemuanya menggunakan nama Djojo (Jaya), yang artinya sukses atau berhasil.

Berdasarkan refleksi perjuangan, filsafat politik yang dikembangkan oleh Raden Mas Said adalah “Tri Dharma”, tiga kebaktian. Tiga dharma itu adalah “(1) *mulat sarira hangrasa wani*, (2) *rumangsa melu handarbeni*, (3) *melu hangrungkeb*”. Menurut Sartono Kartodirdjo, *mulat sasrira hangrasawani* merupakan *candrasengkala* tahun pendirian Mangkunegaran yaitu tahu 1682 C atau 1757 AD. *Mulat sarira* maksudnya memahami diri sendiri sambil melakukan introspeksi diri agar dapat mengatasi segala rintangan yang menghalangi perbaikan pribadi. Selain itu juga mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu (maksudnya masa perjuangan). Melalui introspeksi akan timbul kesadaran kesetiakawanan dan kearaban di antara kawan seperjuangan yang kemudian membentuk “trah Mangkunegaran” atau “*Wong Mangkunegaran*”. *Mulat sarira* bukan saja sebagai semboyan, tetapi juga menjadi prinsip utama bagi rakyat se-

waktu mendirikan negara (kerajaan) (Kartodirdjo, 1994).

Prinsip kedua dari budaya politik Mangkunegaran adalah *Rumangsa Melu Handarbeni*. Ucapan ini disampaikan oleh Raden Mas Said sehabis dinobatkan menjadi Mangkunegara I. Prinsip *melu handarbeni* ini disampaikan Mas Said kepada para pengikutnya agar disampaikan kepada keturunan dan rakyat di wilayah Mangkunegaran. Melalui cara ini, sang pangeran ingin mendapatkan menyadarkan kepada para pengikut dan rakyatnya bahwa Mangkunegaran adalah miliknya sendiri, tempat memperoleh sumber kehidupan dari tanah-tanah yang berada di wilayah Mangkunegaran. Untuk itu perlu dibangun saling kepercayaan antara penguasa dan rakyat. Rakyat dan raja harus membangun sinergi yang bersumber dari nilai-nilai lama yakni “*manunggaling kawula gusti*” dengan tafsir baru pasca perjuangan. Prinsip ke dua ini dapat dipandang sebagai “kontrak sosial” antara raja dan rakyat sebagai dasar prinsip budaya demokrasi.

Prinsip ketiga adalah “*wajib melu anggondheli*”. Dalam prinsip ini antara raja dan rakyat bersama-sama berkewajiban mempertahankan negara Mangkunegaran. Oleh karena sudah ada kesepakatan melu merasa memiliki dan dilandaskan pada refleksi diri masa perjuangan, maka semua warga Mangkunegaran wajib berjuang mempertahankan negara Mangkunegaran jika diserang musuh. Prinsip ketiga ini merupakan akar lahirnya nasionalisme di Nusantara (Kartodirdjo, 1994).

Budaya politik Tri Dharma tersebut sebagai penjabaran dari semboyan perjuangan Raden Mas Said yang dikenal dengan “*Tiji tibeh: mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh*”. Semboyan seperti ini mengandung makna bahwa Mas Said dan pengikutnya saling bahu membahu membangun kesetiaan untuk berjuang memperoleh kemenangan. Hasilnya berupa Praja Mangkunegaran yang dipandang menjadi milik bersama.

IMPLEMENTASI DALAM BIROKRASI DAN TATA PEMERINTAHAN

Budaya politik Mangkunegaran yang dikembangkan oleh Raden Mas Said tersebut mengalami enkulturasi di kalangan trah Mangkunegaran. Enkulturasi budaya politik demikian telah menimbulkan kebanggaan di kalangan pimpinan dan keluarga Mangkunegaran. Rasa kebanggaan itu membentuk identitas diri sebagai “*trah* atau *wong Mangkunegaran*” hingga saat ini.

Untuk membangun citra pemerintahan, Mangkunegaran memodifikasi tatanan pemerintahannya agar menunjukkan citra diri sebagai negara Jawa yang modern, berbeda dengan Kasunanan dan Kasultanan. Penataan pemerintahan telah dibangun sejak Mangkunegara I dan dilanjutkan oleh para penggantinya, terutama Mangkunegara IV, VI, dan VII. Dalam proses penataan birokrasi pemerintahan, ada tarik-menarik antara kepentingan birokrasi Belanda dengan birokrasi Kesunanan Surakarta. Mangkunegaran bisa membentuk jati dirinya sebagai negara Jawa yang modern.

Pada masa Mangkunegara I, kekuasaan Sri Mangkunegara atas pemerintahan relatif sangat terbatas. Ia hanya dibatasi kekuasaannya dalam mengontrol semua aparat menjadi bawahannya, suatu hak untuk membangun loyalitas rakyatnya terhadap Pengageng Pura Mangkunegaran. Meskipun demikian, ia tidak terlepas dari ikatan dengan Belanda dan Sunan dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini tercermin dalam surat-surat keputusan yang dikeluarkannya selalu menggunakan kata-kata “atas pertimbangan residen/gubernur atau “setelah berunding dengan residen atau gubernur”.

Seabad setelah berdirinya Praja Mangkunegaran, yaitu masa Pemerintahan Mangkunegara IV Masyarakat Jawa, termasuk Mangkunegaran mengalami perubahan sosial yang luar biasa sebagai akibat penetrasi rezim kolonial dan modernisasi yang menyertainya. Budaya politik *melu handarbeni* yang melekat dalam jiwa Mangkunegara IV telah mendorong perubahan sosial yang cepat

dalam tatanan birokrasinya. Birokrasi Pemerintahan Mangkunegaran dikembangkan menjadi lebih luas dan fungsional.

Di bawah Mangkunegara terdapat seorang patih, yakni R. Ng. Mangkureja. Ia membawahkan dua departemen, yaitu departemen luar (*reh jaba*) dan departemen dalam (*reh jero*). Patih mendapat gelar tumenggung. Meskipun ada jabatan patih, patih di Mangkunegaran tidak sama dengan patih di Kasunanan. Patih di kedua kerajaan terakhir diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan konsekuensi setia dan taat selain kepada raja Jawa juga taat kepada Pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu patih di Mangkunegaran diangkat oleh Sri Mangkunegara, dan ia hanya setia kepada Pengageng Pura Mangkunegaran tersebut. Patih Mangkunegaran dengan demikian pegawai praja, dan bukan pegawai pemerintah Hindia Belanda. Sebutan patih di Mangkunegaran adalah Bupati Patih.

Pada tahun 1867, Mangkunegara IV melakukan modernisasi pemerintahan. Pembaharuan itu tertuang dalam pranatan tanggal 11 Agustus 1867. Pranatan tersebut membagi pemerintahan di bawah bupati patih menjadi pemerintahan dalam (*reh jero*) dan pemerintahan luar (*reh jaba*). Reh jero terbagi dalam 8 departemen masing-masing dipimpin oleh seorang wedana, yaitu: *hamong praja*, *karta praja*, *marta praja*, *karti praja*, *reksa wibawa*, *mandra pura*, *purba baksana*, dan *yogiswara*. Pemerintahan luar dipimpin oleh seorang *wedana reksa praja*.

Pada masa Mangkunegara VII, modernisasi birokrasi pemerintahan dilanjutkan. Jabatan *reh jaba* dan *reh jero* dihapuskan. Bupati patih yang berada di bawah Mangkunegara VII langsung membawahi departemen-departemen yang pada tahun 1917 telah berkembang menjadi 14 departemen. Departemen-departemen itu disebut kabupaten. Adapun kabupaten-kapupaten dalam birokrasi pemerintahan Mangkunegara VII adalah, kabupaten: *pangreh praja*, *mandra pura*, *parimpuna*, *kartipraja*, *sindumarto*, *wanamarta*, *yogiswara*,

hamongpraja, kartahusaha, sinatriya, pajeg siti, kedokteran, martanimpuna, dan pasinaon dusun (Rijksblaad Mangkunegaran no. 37 tahun 1917; Rijksblaad van Mangkunegaran no. 10 Tahun 1923; Wasino, 2014).

Untuk mendukung jalannya pemerintahan, Pemerintah Mangkunegaran mengembangkan sistem penganggaran yang masuk dalam anggaran masing-masing departemen. Anggaran tersebut selanjutnya dimuat dalam Lembaran kerajaan (*Rijksblad*) yang terbit setiap tahunnya. Pelaporan penerimaan dan pengeluaran anggaran dialurkan dengan pembukuan dengan sangat tertib.

ETIKET YANG BERUBAH

Terkait dengan birokrasi pemerintahan adalah etiket kenegaraan. Etiket kenegaraan berkaitan dengan tata hubungan antar pejabat, keluarga, dan rakyat Mangkunegaran. Secara tradisional, etiket itu telah lama dibangun oleh Kerajaan Mataram. Dalam tradisi Mataram, penghormatan strata sosial yang lebih bawah kepada strata yang lebih atas, terutama pada raja sangat berlebihan. Tradisi itu dikenal dengan tradisi feodal.

Sejak awal abad XX di Mangkunegaran terjadi pembaharuan dan penyederhanaan dalam etiket kenegaraan. Pada tahun 1903 Mangkunegara VI mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada para putra sentana dan nara praja, dan legiun Mangkuengaran agar jika menghadap Sri Mangkunegara di istana tidak perlu duduk bersila, boleh langsung menghadap asal berperilaku sopan. Jika di istana disediakan kursi, maka mereka diperbolehkan duduk di kursi. Tata cara sembah juga disederhanakan. Jika sebelumnya, *punggawa* yang akan menghadap harus menyembah berkali-kali kepada raja, maka sejak itu sembah hanya dilakukan pada saat menghadap, menjelang bicara, serta setelah selesai menghadap raja.

Sejak awal abad XX memang di pendapa Mangkunegaran telah disediakan kursi-kursi, tidak hanya untuk raja dan permaisuri tetapi juga untuk

aparat yang berkunjung ke istana Mangkunegaran. Tradisi baru telah dibangun, jika Sri Mangkunegara VI masuk istana (*miyos*), maka para abdi dalem yang sedang duduk di kursi cukup berdiri untuk menghormati rajanya.

Pembaharuan tata krama juga terjadi dalam hal audensi dengan Mangkunegara. Jika seorang abdi dalem sedang berjalan dengan berpakaian Jawa memakai tutup kepala, maka ia diperbolehkan tidak membukanya, pada hal dalam tradisi sebelumnya harus dibuka. Abdi dalem hanya diwajibkan menunjukkan sikap membungkuk, naga-purancang, dan berhenti.

Perubahan etiket di dalam istana ini bisa dipahami sebagai proses demokratisasi etika Jawa di istana Mangkunegaran. Diperbolehkannya duduk di kursi sejajar dengan raja bagi para punggawa menunjukkan bahwa raja berusaha mengembangkan kesejajaran antara raja dan aparatnya. Pola seperti ini diteruskan pada tataran pemerintahan yang lebih rendah, bahkan sampai tingkat desa. Demikian pula penyederhanaan sembah juga merupakan proses defeodalisasi simbol budaya di Mangkunegaran, yang berbeda dengan Kasunanan dan Kasultanan.

Penyederhanaan tradisi hormat dalam istana seperti ini merupakan tradisi yang melampaui zamannya. Muhlenfeld menyebutkan bahwa pembatasan hormat yang berlebihan baru diatur oleh pemerintah Hindia Belanda beberapa tahun setelah Mangkunegaran menerapkannya. Penyederhanaan hormat ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal van Heutz dengan nama "*circulair van Heutz*". Peraturan tersebut ditujukan kepada para pejabat Hindia Belanda, baik berkebangsaan Eropa maupun bumiputra, terutama di wilayah Gubernemen agar mengurangi pemberian hormat berlebihan kepada para pejabat bumiputra.

Sejak Mangkunegara VI hingga Mangkunegara VII berkuasa, dilakukan modernisasi perilaku, yakni "disiplin". Penanaman kedisiplinan untuk membongkar tradisi "jam karet" yang menjadi kebiasaan di kalangan aparat Mangkunegaran

ketika menjalankan tugas kenegaraan. Dalam menanamkan kedisiplinan, Mangkunegara VI dan Mangkunegara VII dilakukan dengan memberikan contoh nyata.

Akibat sikap disiplin Mangkunegara VI, Sunan PB X pernah menanggung malu. Kalangan istana Kasunanan memberitahukan kepada Mangkunegaran bahwa Sunan akan datang ke Mangkunegaran pada jam 21,00. Akan tetapi karena sampai pukul 21.30 Sunan belum datang maka Mangkunegara VI memerintahkan penjaga pintu gerbang istana untuk menutup pintu gerbang seeperti hari hari biasa. Sunan yang datang terlambat tidak bisa masuk istana Mangkunegaran. Peristiwa ini memiliki implikasi politik yang luas karena Sunan yang secara hierarki dalam budaya Jawa lebih tinggi dari Mangkunegara harus tunduk pada aturan kedisiplinan Mangkunegaran.

Tradisi disiplin telah meningkatkan wibawa Mangkunegaran di hadapan rakyat, Sunan dan, pemerintah Belanda. Sunan terkena getahnya akibat kedisiplinan Mangkunegaran juga pada masa Mangkunegara VII. Pada suatu ketika Sunan menginap di Pesanggrahan Mangkunegaran di Karang Anyar (lereng barat Gunung Lawu) dalam rangka berburu burung. Sunan melepaskan tembakan dua kali untuk menembak burung, tetapi sama sekali tidak mengenai burung. Sesuai dengan aturan Mangkunegaran Sunan dikenai denda 40 gulden karena telah menembak burung tanpa ijin khusus dari pihak Mangkunegaran (Wasino, 2014).

Etika disiplin ternyata dipoles untuk menaikkan citra politik Mangkunegaran di hadapan rival politiknya Sunan. Disiplin yang merupakan tradisi Barat telah diambil alih oleh Mangkunegaran sebagai tradisi baru dan bisa digunakan untuk menunjukkan wibawa politik Mangkunegaran dihadapan Sunan. Pola persaingan politik telah digeser dari peperangan fisik pada masa awal pembentukan Mangkunegaran dengan simbol pada awal abad XX.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Mangkunegaran berdiri sebagai produk perjuangan atau perlawanan. Proses perjuangan yang panjang tersebut menyebabkan adanya interaksi intensif antara pimpinan dengan pengikutnya. Interaksi itu menimbulkan semangat kebersamaan dan kesetiaan antara pimpinan dan pengikut. Interaksi demikian melahirkan budaya politik *Tiji Tibe* dan Tri Dharma yang menjadi nilai bersama setelah negara Mangkunegaran berdiri.

Oleh karena negara Mangkunegaran sebagai produk persaingan dengan Kasunanan, maka penataan pemerintahan di Mangkunegaran ingin menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan Kasunanan yang dianggap kelanjutan Mataram Islam. Birokrasi Mangkunegaran diusahakan lebih ramping dan modern yang memadukan antara konsep Jawa dan “Barat”.

Birokrasi Pemerintahan Mengalami modernisasi sejak Mangkunegara IV dengan membentuk lembaga-lembaga birokrasi yang fungsional untuk kepentingan kerajaan dan rakyat. Pada masa Mangkunegara VI dan VII modernisasi birokrasi pemerintahan semakin dikembangkan karena semakin banyaknya urusan yang harus ditangani. Birokrasi Mangkunegaran telah mengikuti pola birokrasi yang rasional dan fungsional.

Implementasi budaya politik Mangkunegaran juga tercermin dalam identitas disiplin. Tradisi disiplin dibangun sejak Mangkunegara VI telah membentuk identitas baru Praja Mangkunegaran dan menaikkan wibawa politiknya di kalangan punggawa, Sunan, dan Pemerintah Kolonial Belanda.

DAFTAR RUJUKAN

- Daradjadi. 2008. *Perang Sepanjang 1740-1743, Tionghoa-Jawa Lawan VOC*, Jakarta: Eksekutif Publishing.
- Houben, V.J. H. 2002. *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Kartodirdjo, S. 1994. *Pembangunan Bangsa: tentang Nasionalisme, Kesadaran, dan Kebudayaan Nasional*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Pakempalan Ngarang Serat ing Mangkunegaran. 1976. *Serat Babad Panembangan*. Seksi Hubungan Masyarakat dan Penerbitan Yayasan Mangadeg Surakarta
- Rijksblad Mangkunegaran no. 37 tahun 1917
- Rijksblad van Mangkunegaran no.10, tahun 1923
- Rouffaer, G.P. 1931. *Vorstenlanden ; Adatrechtbundels, vol. .34*
- Wasino. 2014, *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa, Mangkunegaran 1896-1944*. Jakarta: Gramedia
- Widjaja, A. 1988. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES

¹ Artikel ini pernah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “Sistem Politik Jawa dalam Perspektif Historis” di Aula A3 Lantai 2 Universitas Negeri Malang yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang pada tanggal 2 November 2015.